

JAWARA DALAM PUSARAN POLITIK: KOOPTASI POLITIK ORGANISASI TTKKDH (TJIMANDE TARI KOLOT KEBON DJERUK HILIR)

Fransisca Nabela¹
Rifky Shihabudin²
Putri Khispa Yadia³
Dwi Wulan Dari⁴
Mahpudin⁵

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: [Mahpudin.ip@untirta.ac.id⁵](mailto:Mahpudin.ip@untirta.ac.id)

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang hubungan relasi kuasa atau kooptasi politik yang ada dalam tubuh organisasi kesenian budaya TTKKDH (Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir) pada politik wilayah Banten. Budaya lokal atau tradisional dengan unsur bela diri di Banten identik dengan sebutan Jawara hal tersebut menjelaskan bahwa arah gerak TTKKDH sebagai organisasi budaya dan seni bela diri yang termasuk dalam pusaran Jawara. Kedekatan organisasi TTKKDH dengan elite-elite politik menjadi sorotan publik, bahkan anggota atau pemimpin dari TTKKDH merupakan bagian dari elite politik itu sendiri, dengan prinsip solidaritas dan kesetiaan organisasi TTKKDH dengan sangat mudah melakukan pola kooptasi politik karena seluruh anggota harus mengikuti arahan dari ketua. Dibalik kesenian budaya bela diri TTKKDH bertujuan untuk mendapatkan Resources negara berupa kepentingan ekonomi, sehingga dapat hubungan timbal balik antara organisasi TTKKDH dengan elite politik di wilayah Banten. Dalam memahami fenomena tersebut peneliti memahami dan menganalisis dengan menggunakan teori politik kooptasi menurut Markus Holdo, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya upaya dan strategi organisasi TTKKDH dalam mempertahankan, mengakses dan memperluas relasi dengan aktor-aktor politik, saat ini TTKKDH dalam memperluas relasi menerapkan wajah yang netral sehingga memiliki kedekatan dengan beberapa partai politik. Kooptasi politik yang terjadi dalam organisasi TTKKDH untuk memobilisasi massa dari internal organisasi untuk membantu dalam legitimasi dari kemenangan kontestasi politik, dari hal tersebut mengindikasikan adanya pola patron klien yang dilakukan oleh organisasi TTKKDH.

Kata kunci: Kooptasi Politik, Jawara, TTKKDH

ABSTRACT

This article examines the relationship between power relations or political co-optation within the cultural arts organization TTKKDH (Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir) in the politics of the Banten region. Local or traditional culture with martial arts elements in Banten is synonymous with the term Jawara. This explains the direction of TTKKDH as a cultural and martial arts organization that is included in the Jawara path. The closeness of the TTKKDH organization to political elites is in the public spotlight, even the members or leaders of TTKKDH are part of the political elite themselves, with the principle of solidarity and loyalty the TTKKDH organization very easily carries out a pattern of political co-optation because all members must follow the direction of the chairman. Behind the cultural arts of martial arts,

TTKKDH aims to obtain state resources in the form of economic interests, so that there can be a reciprocal relationship between the TTKKDH organization and the political elite in the Banten region. In understanding this phenomenon, researchers understand and analyse it using the political theory of co-optation according to Markus Holdo, so this research uses qualitative methods with a phenomenological approach. The results of this research show that there are efforts and strategies of the TTKKDH organization in maintaining, accessing and expanding relationships with political actors. Currently, TTKKDH is using a neutral face in expanding relationships so that it has close ties with several political parties. The political co-optation that occurred within the TTKKDH organization to mobilize the masses from within the organization to assist in legitimizing the victory of political contestation, from this indicates a patron-client pattern carried out by the TTKKDH organization.

Keywords: Political Co-optation, Jawara, TTKKDH

PENDAHULUAN

Kebangkitan dari adanya perimbangan antara sebuah kekuasaan dengan negara menjadikan hal ini sebagai bentuk yang sangat sempurna. Fenomena yang terjadi di antara lingkup aktor lokal dan para politisi membawa negara kepada peristiwa menjamurnya relasi kuasa aktor lokal dengan institusi politik. Kemunculan tipe politik yang semakin beragam pun menjadikan segala bentuk relasi tersebut lambat laun mulai berkembang. Adanya fenomena maju dan mundurnya sebuah demokrasi bisa dirasakan dan dapat kita lihat dari sejauh mana *society* serta relasi politik yang beroperasi dan bekerja di dalamnya, apakah mendapatkan dukungan atau malah menghambat sebuah jalannya demokrasi (Mahpudin, 2019).

Praktik relasi patron dan klien yang terjadi pada lingkup politik terutama kooptasi menimbulkan banyaknya bibit-bibit kecil hubungan politik dengan aktor informal. Diwilayah Banten khususnya, aktor diwilayah Banten memandang bahwa sebuah kekerasan sebagai salah satu kategori kebudayaan dimana hal ini

dianggap sebagai bentuk konstruksi yang mulai berkembang secara historis.

Pandangan tentang kekerasan oleh aktor informal diwilayah Banten selalu dibatasi oleh bentuk ruang dan juga waktu dimana sebagian besar dari mereka akan terlibat dalam ajang relasi kekuasaan dan lingkup masyarakat (Pribadi, Y. 2014). Dimana mereka akan menjadi pelaku, penonton, serta pengamat atau saksi, bahkan pihak berwenang di kancah pemerintahan. Merambatnya hubungan politik antara aktor ini menjadikan hubungan transaksi antara aktor formal dan informal ini berlanjut, apalagi dalam politik dan pemerintahan pada tingkat lokal mulai tumbuh banyaknya hubungan relasi patron dan klien yang timbul pada anak-anak wilayah dan daerah (Putri, R. T. S. I., & Herawati, N. R. 2023). Bukan hanya itu kewaspadaan kehadiran mereka diperkuat dengan hubungan dan jaringan relasi mereka, dimana mereka mulai merambah ke dalam sisi institusi pemerintahan dan memegang kekuasaan dengan kendali dan sokongan latar belakang organisasi mereka.

Ada beberapa pengkategorian aktor informal khususnya di wilayah Banten yaitu *strongmen* serta kekerasan atau rampok

atau bandit, jago, JAWARA, dan preman dimana mereka ini berasal dari organisasi yang ada di bawah naungan pertahanan kuat yang sudah dipelihara sejak dulu (Pribadi, Y. 2014). Dengan titik fenomena lokal ini ter jadi kan relasi kooptasi yang berimbang sehingga memunculkan hubungan *take and give* pada tingkat lokal dalam bingkai budaya politik lokal. Kehadiran aktor informal di dalam lingkup politik dan pemerintahan menjadikan adanya perubahan pengertian dari orientasi warisan organisasi-organisasi informal, namun tidak dipungkiri warisan akan kekerasan seperti keberanian dan premanisme masih akan tetap dan terus melekat di dalam diri setiap JAWARA. Di samping memahami identitas, di antara beberapa organisasi-organisasi di wilayah persilatan Banten yang masih bertahan bahkan kehidupan mereka semakin semarak yaitu adalah organisasi KESTI TTKKDH (Kebudayaan Seni Silat dan Tari Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir). (Astuti, D. S. 2023).

TTKKDH atau organisasi yang dikenal bergerak di dalam relasi dibidang budaya seni dan budaya ini lambat laun mulai memunculkan wajah-wajah semarak relasinya. Sebagai ketua DPP TTKKDH yaitu H Wahyu Nurjamil mulai melebarkan sayapnya dengan mencoba peruntungan mengikuti kontestasi pesta pemilihan pada tingkat Wali Kota Serang (Sumber : Radar Banten). Keterbukaan relasi yang kini terjadi menjadikan organisasi ini bertahan hidup hingga berhasil merambat kepada dunia hubungan dengan partai politik,

pemerintahan, dan politik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana sebuah keberhasilan para anggota TTKKDH yang berhasil masuk di dalam saluran-saluran pemerintahan mulai dari unit terkecil seperti dinas pemerintahan hingga berada di kancah Wali Kota.

Penguatan hubungan organisasi TTKKDH yang terjadi pada masa orientasi H Maman Rijal hingga sekarang dipimpin oleh H Wahyu Nurjamil memunculkan gebrakan kuat tentang bagaimana organisasi ini berhasil mempertahankan legitimasi mereka di masyarakat dan di politik pemerintahan. Hubungan percobaan mereka mulai dari bentuk patron klien antara aktor formal dan informal, bahkan sebagian pimpinan mereka mulai berkembang dan berkancah dibidang politik dan pemerintahan. Adanya perubahan bentuk relasi yang mereka mulai setelah di bawah kepemimpinan yang sekarang menambah kekuatan legitimasi mereka dibidang politik, sekarang ini mereka mulai merambah dan mulai menjalin kedekatan-kedekatan dengan berbagai partai politik. Bukan tanpa sebab, hubungan yang terjalin ini didasari oleh rumus patron dan klien "siapa yang memberi, kami akan dukung" serta "siapa yang memberi, kami akan ikut menjaga". Dimulai dari sinilah kami akan membahas bagaimana pandangan dari kacamata politik melalui jembatan hubungan relasi dan hubungan legitimasi organisasi TTKKDH dengan pemerintahan dalam pusaran politik.

Kooptasi adalah strategi dari elite yang menggunakan hal-hal yang sifatnya

kooperatif untuk menyerap beberapa aspirasi kelompok-kelompok untuk mengooptasi (Holdo, 2019). Dalam beberapa literatur para sarjana banyak memperbincangkan kooptasi. Namun sejatinya kooptasi merupakan teori sosiologi yang berbasiskan pada organisasi. Banyak contoh yang mengatakan situasi kooptasi dimana kelompok sosial dapat mengancam untuk mengambil alih kekuasaan politik dari pemegang kekuasaan (Bertocchi dan Spagat, 1999).

Hegemoni yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dapat dengan mudah merespon dan menindak lanjuti atas protes masyarakat atau gerakan-gerakan sosial dengan melakukan ancaman dengan melakukan pilihan kooptasi. Seperti yang terjadi di Rusia, hegemoni negara yang sangat kuat bahwa pemerintah dapat melakukan kekuasaan yang sangat kuat dengan mengooptasi sektor-sektor privat yang mencoba melakukan kebijakan kooptasi dalam ranah ekonomi. Kooptasi bisa menjadi bagian dari strategi pemerintah yang memungkinkan untuk sebagai situasi pengamanan negara melalui kebijakan yang memiliki monopoli politik sebagai kelompok yang memegang kuasa hegemoni yang dilakukan oleh negara.

Kooptasi dapat terjadi tidak hanya dari kalangan elite saja, namun kooptasi dapat terjadi pada agenda-agenda gerakan sosial yang terjadi. Memang pada dasarnya kooptasi ini digunakan oleh para elite politik sebagai agenda elite untuk menerapkan kepentingan elite saja. strategi kooptasi

selalu atau bahkan sering kali merupakan bagian dari hasil perhitungan dari elite (Coy dan Hedeem, 2005). Namun tindakan masyarakat pada umumnya dapat menggunakan konteks sebagai respon terhadap insentif dan disinsentif. Tujuan dari strategi kooptasi yang dilakukan oleh para pelaku merupakan hasil penilaian mereka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Interaksi sosial yang dibentuk oleh struktur sosial membentuk komunikasi dua arah. McAdam (2010) mengatakan bahwa dari sebuah interaksi antara negara dan kelompok-kelompok masyarakat dimana dinamisnya perubahan struktur sosial menciptakan peluang baru bagi sumber daya sebuah organisasi yang terlibat dalam gerakan agar mendapatkan keuntungan antara kedua belah pihak.

Strategi elite dalam melakukan kooptasi ialah menggunakan skenario para aktor elite yang memimpin gerakan dan menyadari bahwa harus adanya relevansi yang mengadopsi strategi otonomi yang dilakukan harus menjamin dan menjangkau secara luas. Secara singkatnya Selzhenick mengatakan bahwa kooptasi digunakan untuk menggambarkan bahwa gerakan oposisi terhadap pemerintah telah dianggap secara efektif. Maka kita dapat melihat bahwa situasi yang menyebabkan terjadinya kooptasi yaitu dengan strategi yang relevan dan memungkinkan. Kooptasi pada awalnya didahului oleh perlawanan dan protes melalui gerakan-gerakan sosial yang terjadi. Analoginya yaitu kooptasi muncul ketika para elite mengakui bahwa

agenda mereka atau legitimasi mereka dipertanyakan oleh organisasi masyarakat tertentu.

Kooptasi politik yang muncul didahului oleh pemerintah terhadap gerakan-gerakan sosial masyarakat atau organisasi yang memiliki patron-klien. Seperti sebagaimana yang sudah dijelaskan, praktik kooptasi ini memiliki keuntungan pribadi bagi elite atau gerakan organisasi masyarakat sampai pemerintahan itu sendiri.

Reuter dan Robertson (2015) menjelaskan kooptasi politik yang dilakukan sebagai agenda elite yang terjadi di badan legislatif yang memiliki otoritas dalam membuat regulasi kebijakan. Posisi legislatif yang memiliki wewenang sebagai pembuat kebijakan, posisi ini dapat mencari keuntungan dan peluang untuk melobi kepentingan bisnis dan keuntungan pribadi. Akibatnya penunjukan-penunjukan penting ini dapat digunakan sebagai kooptasi pribadi untuk menargetkan para perwakilan oposisi untuk memberikan mereka tempat khusus di kursi-kursi rezim penguasa.

Kooptasi yang dilakukan oleh para politisi di Berlin contohnya, mereka melakukan kooptasi melalui penunjukan kabinet dengan memberikan akses terhadap sumber daya negara bagi kelompok-kelompok oposisi yang mengakar di sana (Arriola et.al, 2021). Menurut Selznick, kooptasi terbagi ke dalam dua yaitu kooptasi formal dan informal. Menjelaskan bagaimana kooptasi yang terjadi antara hubungan LSM (Ormas) dengan pemerintah. Ia berkata bahwa kooptasi dapat terjadi jika strategi LSM

(Ormas) dan pemerintah dapat selaras. Namun dikembangkan oleh yang mengatakan bahwa kooptasi politik sebagai salah satu potensi dari hasil adanya keterlibatan organisasi-organisasi. Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan LSM-Pemerintah yang memiliki intrik kerja sama dapat dikatakan sebagai sebuah kooptasi politik dengan agenda elite yang dapat menguntungkan bagi LSM maupun pemerintah.

Adapun tinjauan literatur mengenai studi terdahulu yang membahas tentang kooptasi itu sendiri yang menjadi suatu strategi elite untuk melemahkan gerakan dengan menghilangkan kredibilitas pada agen perubahan dan akan bersifat rasional jika bentuk kerja sama lebih rendah dari adanya dominasi politiknya terdapat bentuk kepercayaan, legitimasi dan otonomi yang terjamin pada studi mengenai Gerakan Hak-Hak Sipil AS dan penganggaran partisipatif di Amerika Latin. (Holdo, Markus, 2019), studi lainnya dalam ranah politik kooptasi yang terjadi pada hak pilih buruh tani pada Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Bulukumba dimana penelitian tersebut menyebutkan terdapat aktor yaitu Karaeng yang berkuasa dalam kepemilikan lahan pertanian karena relasi yang ada di antara kedua aktor menghadirkan kooptasi dari hak pilih dari buruh tani (Yuliana, dkk, 2019). Studi yang membahas mengenai relasi kuasa pada ranah lokal yaitu adanya relasi politisasi di pelabuhan Karangantu Serang dengan adanya suatu power dan status sosial yang digunakan menjadi modal dalam perwujudan relasi kuasa (Utama, Aire

dan Hikmawan, M, 2023). Banyak aktor dalam ranah lokal yang hadir dalam permukaan seperti fokus pada penelitian ini yaitu Jawara, studi (Syadeli, 2021) yang menjelaskan bahwa Jawara merupakan kelompok preman dan bandit yang identik dengan kekerasan dan intimidasi untuk menghalangi atau mencapai tujuan dari suatu kepentingan serta bersifat heroistik.

Namun pada studi (Salim, A., 2020) menemukan fakta bahwa saat ini Jawara di Banten saat ini memiliki arah juang untuk bela diri, bela bangsa dan bela negara, dengan membawa budaya lokalitas mereka yaitu seni persilatan yang memiliki ilmu kesaktian sehingga dapat menumbuhkan rasa takut dan hormat pada masyarakat, namun bela diri tersebut perilaku yang tidak lepas dari kepentingan ekonomi dari kelompok Jawara. Studi terdahulu juga menjelaskan kuatnya kooptasi pada aktor lokal Jawara dengan elite politik, (Putri, R. T. S. I., & Herawati, N. R, 2023) menjelaskan mengenai relasi kuasa atau patron klien dari pasangan Cagub tahun 2017 yaitu Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan ulama untuk memobilisasi massa, dalam penelitian tersebut juga disebutkan keterlibatan organisasi TTKKDH dalam relasi patron klien tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah dari eksistensi suatu organisasi TTKKDH di Provinsi Banten dan tinjauan landasan teori politik kooptasi serta penelitian terdahulu, maka peneliti akan menganalisis bagaimana suatu fenomena dalam organisasi TTKKDH dapat mengakses, memperluas dan

mempertahankan relasi dengan politisi atau *resources* negara?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan merujuk pada metode kualitatif. Berdasarkan definisinya, metode kualitatif sendiri merupakan suatu penelitian yang mengaitkan pemahaman dengan menelisik lebih lanjut terkait dengan fenomena sosial dan kemanusiaan. Berkenaan dengan metode kualitatif, Creswell (2013) memiliki pandangan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif sendiri diantaranya guna mendeskripsikan, mengeksplorasi, serta memahami makna dari individu ataupun kelompok yang terlibat dalam fenomena yang terjadi. Dengan fokus pada eksplorasi yang mendalam dan interpretasi makna dalam konteksnya, metode ini memungkinkan peneliti lebih intensif dalam memperoleh informasi berdasarkan fenomena yang dikaji.

Selanjutnya, berdasarkan pendekatan yang diterapkan yakni melalui pendekatan fenomenologi, Creswell (2023) memahami fenomenologi sebagai suatu pendekatan yang berusaha memahami makna atas suatu fenomena yang dipandang melalui perhatian utama pada pengalaman subjektif individu yang terikat pada fenomena tersebut. Diterapkannya pendekatan tersebut berguna dalam membantu penulis pada saat menganalisis penelitian yang diangkat yakni mengenai “Jawara Dalam Pusaran Politik: Kooptasi Politik Organisasi TTKKDH (Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir)” Berdasarkan

metode dan pendekatan yang diterapkan, penelitian ini berfokus pada batasan masalah seperti halnya yang disampaikan ungkapkan oleh Sugiyono bahwa adanya batasan yang tergolong pada metode kualitatif guna menjadi bahan acuan yang diperuntukkan dalam meneliti agar tujuan atas penelitian tersebut dapat tercapai (Sugiyono, 2017). Dengan demikian, fokus penelitian kali ini merujuk pada “bagaimana TTKKDH dapat mempertahankan, memperluas, dan mengakses *resources* negara?”

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diawali dengan melakukan observasi terlebih dahulu terkait dengan permasalahan yang akan dianalisis sebelum melanjutkan ke tahap wawancara, hal ini ditujukan agar data yang diperoleh tidak didapat secara tergesa-gesa yang mana hal tersebut dikhawatirkan adanya ketidaksesuaian data yang diperoleh dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara dengan durasi selama 60-90 menit, untuk informan sendiri ialah Ir. Hakim Sulaeman Akbar Sebagai Ketua DPW Kesti TTKKDH selaku anggota TTKKDH DPW Banten. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber lain sebagai data pendukung yang dirujuk dari berbagai artikel ilmiah yang dianggap masih relevan dengan topik yang diangkat dengan maksimal terbitan 10 tahun ke belakang.

Pada tahap pengolahan data, penulis menggunakan triangulasi data dalam deskripsi tekstual dan deskripsi struktural untuk memvalidasi data melalui

hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk meningkatkan keabsahan dan kepercayaan hasil penelitian dengan cara menyatukan dan membandingkan informasi baik itu dari sumbernya, teknik, serta konsep teoritis. Dalam penelitian fenomenologi ini, peneliti menggunakan triangulasi metode dengan cara membandingkan informasi dari wawancara, pengamatan, dan catatan. Terakhir, penulis juga melakukan pengecekan dengan memberikan hasil pengamatan kepada informan untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

SEJARAH PERKEMBANGAN TTKKDH (Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir)

Organisasi TTKKDH atau Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir, memiliki sejarah yang kaya dan berakar dalam kehidupan masyarakat tradisional Jawa Barat, Indonesia. Berdiri pada tahun 1975 di desa Djeruk Hilir, organisasi ini bermula sebagai upaya untuk melestarikan seni budaya lokal, khususnya tarian tradisional yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan ritual masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, TTKKDH tidak hanya menjadi wadah untuk mempertahankan warisan budaya, tetapi juga berkembang menjadi pusat kegiatan komunitas yang aktif. Organisasi ini menjadi penting dalam menjaga identitas budaya dan nilai-nilai tradisional dalam menghadapi arus modernisasi yang semakin pesat.

Dalam perjalanannya, TTKKDH telah mengalami berbagai tantangan dan pencapaian yang memperkuat perannya sebagai pelindung dan pengembang seni dan budaya lokal. Melalui upaya kolaboratif dengan pemerintah setempat dan dukungan masyarakat, organisasi ini terus berusaha untuk memperluas pengaruhnya dalam menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan memahami kekayaan budaya leluhur. Dengan menggali akar sejarah dan semangat perjuangan yang mengilhami, TTKKDH terus melangkah maju sebagai penjaga kearifan lokal yang tak ternilai harganya, menawarkan warisan yang hidup dan terus berkembang bagi generasi mendatang. Kehadiran Tjimande sendiri pada awalnya diklaim sebuah kesenian milik etnis Sunda yakni yang mencakup wilayah Jawa Barat dan Banten, akan tetapi setelah beberapa waktu Tjimande ini mulai tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan sejarah, perluasan Tjimande ini dikarenakan adanya mandat yang dijatuhkan dari Mbah Buyah ke Mbah Main untuk menyebarluaskan Tjimande di luar Jawa Barat dan Banten. Jika menyelisik lebih jauh lagi pencak Tjimande ini tidak hanya tersebar di wilayah di Indonesia akan tetapi kesenian Tjimande yang termasuk ke dalam budaya bangsa Indonesia ini justru dapat diterima juga di berbagai wilayah khususnya di mancanegara, hal tersebut dibuktikan dengan adanya penerapan aliran Cimande Indonesia yang digunakan oleh berbagai pelatihan yang bertempat di luar negara Indonesia antara lain seperti Belanda dan Amerika Serikat. Sedangkan,

untuk pelatihan di Belanda sendiri yang didirikan oleh Sidik Sakabrata yang memiliki nama perguruan Pajajaran nasional sedangkan untuk pelatihan yang ada di Amerika Serikat didirikan oleh Herman Suwanda dengan nama perguruan pencak silat Mande muda. Merujuk pada pola perekrutan anggotanya diketahui TTKKDH sendiri justru tidak melakukan penawaran khusus dalam menerima keanggotaan murid baru akan tetapi bertambahnya jumlah anggota yang tergabung dalam organisasi TTKKDH didasari atas keinginan sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Bagi para calon murid baru tersebut diketahui tidak terikat dengan adanya persyaratan secara terstruktur akan tetapi diutamakan dari adanya kesiapan para murid pada tahap pelatihan.

Apabila melihat dari adanya ketidakpastian jumlah murid yang tergabung, kian hari jumlah peminat kesenian Tjimande ini justru mengalami peningkatan. Diketahui bahwa hal tersebut didasari oleh adanya pola rekrutmen yang cenderung cukup unik, Yang mana ketika mereka yang datang berniat untuk bergabung justru diperlihatkan berbagai atraksi dari tarian silat yang diiringi dengan musik tradisional setelah itu baru mereka diberi kesempatan untuk menentukan keputusannya terkait dengan setuju atau tidak setujunya mereka tergabung dalam TTKKDH. Berkaitan dengan peningkatan pada anggota TTKKDH, bila meninjau atas eksistensi Kesti TTKKDH Bukan sekedar hadir sebagai kumpulan atas pelatihan sebuah ilmu Bela diri semata akan tetapi

eksistensi TTKKDH berkiprah sebagai wadah pemersatu bagi para anggotanya yang memiliki keragaman identitas, khususnya di wilayah Banten. Dalam perjalanan perkembangan Kesti TTKKDH ini tidak hanya ditandai oleh adanya peningkatan dan peran sebagai pemersatu berbagai entitas, akan tetapi terdapat hal lain yang mengiri perjalanan TTKKDH. Sekitar tahun 2013 di wilayah Banten, terjadi sebuah perselisihan yang didasari dengan adanya kondisi Kepemimpinan Kesti TTKKDH yang terbagi menjadi dua bagian diantaranya H. Maman Rijal dan H. Suhemi yang menduduki posisi pimpinan di DPP Pusat. Ditetapkannya hal tersebut justru menimbulkan aksi penolakan dari para Kubu Kesti TTKKDH di bawah naungan pimpinan H. Maman Rijal, aksi penolakan terhadap H. Suhemi ini berlangsung di Gedung serbaguna Golkar Serang tepatnya di tanggal 17 Desember.

Di lain sisi terjadinya perpecahan pada kasti TTKKDH di Banten ini salah satunya disebabkan oleh adanya sikap dari kubu H. Suhaimi yang melancarkan kepentingan lain dengan mengatasnamakan TTKKDH, atas hal tersebut kubu Maman Rijal menyatakan bahwa pihak yang jauh lebih berhak melantik ialah dari kubu Maman Rijal sendiri dan akhirnya yang awalnya terdapat acara yang menyangkut dengan pelantikan DPW TTKKDH justru ditolak (Quraisin, 2017). Bapak MA. Suharmin Tobri, seorang tokoh yang dihormati dalam komunitas TTKKDH (Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir), memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan internal yang terjadi dalam organisasi ini. Perselisihan

tersebut, yang mungkin berkaitan dengan kepemimpinan atau kebijakan internal, diselesaikan melalui proses musyawarah dan diawasi oleh pimpinan DPP TTKKDH Indonesia. Melalui proses musyawarah, berbagai pihak yang terlibat dalam konflik berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai dan menghormati keputusan yang diambil. Pada akhirnya, pimpinan DPP TTKKDH Indonesia yang saat itu dijabat oleh Bapak H. Maman Rijal, diputuskan untuk tetap memimpin organisasi hingga dilaksanakannya Muscab (Musyawarah Cabang) pada periode berikutnya. Keputusan ini didasarkan pada konsensus dari anggota dan pemimpin organisasi yang berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan organisasi serta untuk melanjutkan misi pelestarian seni dan budaya tradisional yang menjadi tujuan utama TTKKDH.

Berdasarkan paparan yang diungkapkan oleh asisten dari Bapak H. Maman Rizal dalam konteks ini, pihak kepemimpinan TTKKDH dengan tegas mengapresiasi semua organisasi yang turut peduli terhadap seni dan budaya lokal (Quraisin, 2017). Namun, mereka juga menggarisbawahi pentingnya menghormati eksistensi organisasi yang sudah ada demi menjaga harmoni dan mencegah potensi konflik di masa depan. Pihak kepemimpinan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak H. Maman Rizal, dengan tulus meminta organisasi yang baru ditemukan ini untuk mempertimbangkan untuk mengganti nama dan lambang mereka. Hal

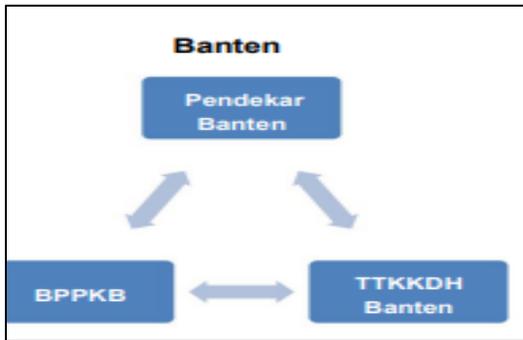
ini dilakukan bukan hanya sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan adanya kebingungan atau perselisihan, tetapi juga untuk memastikan kebaikan bersama dalam keberlangsungan aktivitas seni dan budaya. Mereka menegaskan bahwa mereka baru mengetahui tentang kesamaan lambang dan nama tersebut dari surat undangan pelantikan TTKKDH di Hotel Ratu Bidakara serta dari bendera yang terlihat di salah satu ruas jalan di Kota Serang. Dalam konteks ini, pernyataan ini menunjukkan bahwa upaya mereka adalah untuk mempertahankan identitas dan warisan TTKKDH secara eksklusif, sambil mendorong organisasi lain untuk menciptakan identitas yang unik dan menghormati hak cipta.

Kooptasi Politik TTKDH

Melihat bagaimana pola kooptasi politik yang ada dalam tubuh organisasi kesenian dan bela diri, dapat kita lihat dari peran mereka sebagai elemen kunci pengamanan ketika negara gagal hadir. Kehadiran negara yang belum bisa merambah ke daerah-daerah lokal terjadi ketika masa transisi dari rezim otoriter ke arah demokrasi. Hegemoni yang menciptakan adanya kooptasi dapat berjalan dengan leluasa ketika pemerintah dapat melakukan aksi-aksi relasi kuasa dan kerja sama bersama aktor ormas. Politik kooptasi terjadi ketika adanya kesempatan dari ke tidakhadiran negara dalam ruang-ruang di masyarakat dan muncul sebuah awalan kekuasaan (Acemoglu dan Robinson, 2014).

Bentuk kooptasi telah menasar ke organisasi masyarakat yang memiliki sifat-sifat militeristis, seperti Jawara yang ada di Banten. Kegigihan milisi sipil di Banten sangat superior khususnya pasca pemekaran pertama Provinsi Banten telah memiliki banyak indikasi memiliki kedekatan, ditambah penguasa rezim dinasti yang memiliki latar belakang sebagai jawara di Banten. Kegigihan dan menguatnya elite daerah yang menjadi penguasa lokal menjadi salah satu bagian yang mengentaskan lemahnya masyarakat sipil (Facal, 2019). Banyaknya misi elite politik di tengah-tengah lemahnya masyarakat sipil yang tergiur dan memunculkan kooptasi dari organisasi tersebut.

Di Provinsi Lampung, milisi sipil yang sangat mendominasi dalam ranah keamanan di masyarakat memiliki praktik yang sama seperti yang ada di Banten. Peran milisi sipil menghimpun terhadap lobi-lobi partai politik, birokrasi dan masyarakat sipil. Praktik kooptasi yang terjadi memiliki intrik hubungan dengan penguasa lokal. Seperti Jawara (TTKDH) dengan penguasa lokal dinasti politik Ratu Atut di Banten. Kooptasi yang dilakukan pada awalnya berupa kekuatan TB. Chasan Shohib di Banten dengan mengerahkan para Jawara untuk mengamankan gedung DPRD sebagai bentuk ancaman. Memahami bagaimana relasi dari kooptasi politik yang dilakukan adanya keterlibatan budaya dan seni yang mempengaruhi identitas dari kooptasi politik tersebut.



Gambar 1. Kooptasi Politik TTKKDH

Relasi kuasa yang mengakibatkan adanya kooptasi politik pada organisasi TTKKDH menjadi bagian dari kepentingan elite politik. Kooptasi dilakukan sebagai upaya melemahkan ruang-ruang sipil yang ada di masyarakat demi kepentingan elite-elite lokal. Kedekatan antara elite organisasi dengan elite politik menciptakan ruang-ruang kerja sama bagi organisasi yang dengan sangat mudah dilakukannya kooptasi politik.

Dalam organisasi TTKKDH kooptasi politik terjadi ketika adanya kuasa lokal dalam aras politik lokal yang dengan mudah melakukan mobilisasi sipil. Peran Jawara sangat terlihat pada massa reformasi dalam Pilkada Banten yang dipilih oleh DPRD (Saepudin dan Kamarudin, 2018). TTKKDH yang memiliki kedekatan dengan elite telah memiliki legitimasi di masyarakat sebagai sebuah kelompok pengamanan, kini memiliki kepercayaan di masyarakat. Pola kooptasi yang menjadi agenda elite setiap tahun-tahun pemilu maupun pengamanan terhadap ruang-ruang di masyarakat memberikan peruntungan bagi kelompok organisasi silat ini.

Jika rezim orde baru berkuasa, identitas jawara melekat kepada Golkar sebagai pegangan mereka dalam wilayah pengamanan terhadap masyarakat, kini mereka memperluas pengaruhnya ke beberapa partai lain. Itu bisa saja menyimpulkan bahwa perluasan wilayah jawara tidak hanya semakin luas dalam ranah budaya tetapi juga dalam ranah struktural (Irfani dkk., 2019). Kooptasi yang dilakukan dengan cara mendekati elite lalu rencana selanjutnya yaitu pada wacana terhadap legitimasi bersama seperti dalam kampanye politik misalnya. Di samping itu, TTKKDH dan elite-elite politik di Banten memiliki hubungan yang amat dekat. Sebelumnya pada pemilihan WH-Andika, peran politik TTKKDH dilakukan dengan berhasil memenangkan pasangan tersebut (Saepudin dan Kamarudin, 2018).

Kooptasi yang menciptakan adanya relasi patron-klien ini sangat menguntungkan kedua belah pihak. Antara TTKKDH dan elite politik misalnya mereka melakukan kerja sama dengan mempropagandakan agenda elite, TTKKDH sebagai patron dari elite partai politik mendapatkan sumber daya dalam bentuk finansial, alat-alat latihan dan juga dapat masuk ke wilayah-wilayah struktural yang ada di pemerintahan. Dengan adanya kedekatan dan kerja sama, organisasi TTKKDH ini telah terkooptasi dengan agenda-agenda elite, namun bedanya dengan era orde baru, TTKKDH pasca reformasi tidak hanya terpaku oleh salah satu partai politik seperti Golkar, tapi

TTKKDH telah memiliki jejaring di luar partai Golkar.

Strategi TTKDH

Kooptasi merupakan hubungan atau relasi dalam bentuk kerja sama yang tujuannya untuk memperluas basis dukungan dan meningkatkan legitimasi serta memajukan agenda politik. TTKKDH dalam hal tersebut telah terindikasi menjalankan praktik kooptasi politik untuk memunculkan suatu hegemoni yang kuat, dari hegemoni yang dimiliki dan sistem kepemimpinan yang sangat kuat dapat mempertahankan eksistensi baik secara internal keanggotaan dan juga eksternal dalam masyarakat umum. Kooptasi politik TTKKDH terjalin dengan beberapa elite politik yang mayoritas pada daerah Provinsi Banten, para elite mengandalkan dan terkooptasi dengan TTKKDH untuk mendapatkan suara dari aksi mobilisasi dari TTKKDH karena organisasi TTKKDH merupakan bagian dari Jawara Banten dengan anggota yang banyak dan kuat secara ilmu. Sebagai organisasi kebudayaan lokal perguruan silat dinilai sebagai Jawara yang memiliki *power* yang sangat kuat dan berpengaruh, pimpinan atau ketua umum memiliki otoritas penuh atas pergerakan organisasi TTKKDH dengan menerapkan prinsip kesetiaan dan solidaritas mayoritas anggota akan mengikuti arahan baik dalam aktivitas internal dan aktivitas politik. Elite politik atau pemangku kepentingan akan mendapatkan keuntungan baik massa maupun perlindungan dari TTKKDH. Tentu dari kooptasi tersebut TTKKDH akan

mendapatkan berupa sumber daya baik dalam bentuk kerja sama, *privillage*, uang, kesekretariatan yang digunakan untuk menunjang keberlangsungan aktivitas TTKKDH karena pada dasarnya arah gerak bertujuan pada kepentingan ekonomi yang diwujudkan dari legitimasi kepemimpinan yang bersifat lokal. Maka berdasarkan potret kooptasi politik organisasi TTKKDH terdapat beberapa strategi penting yang dilakukan untuk dapat mengakses, memperluas dan mempertahankan sumber daya negara.

Pertama, TTKDH dalam mengakses Resources negara, dalam hal ini TTKKDH berperan sangat aktif dalam pelestarian budaya lokal provinsi Banten yaitu seni bela diri silat yang sudah memiliki anggota ribuan dengan begitu. Anggota TTKKDH dapat dikatakan sebagai preman-preman Banten dengan memiliki keilmuan yang sangat tinggi, dengan hal tersebut organisasi TTKKDH disegani atau ditakuti oleh masyarakat luas terutama pada daerah Serang dan sekitarnya. Dalam mengakses instrumen publik atau negara TTKKDH mengakses dalam bidang keamanan masyarakat, karena pemerintahan Provinsi Banten yang tidak ada peran dalam intensitas keamanan baik dalam Polri dan TNI, di Provinsi Banten sendiri banyak aktor dan organisasi lokal yang dilibatkan karena legitimasi lebih kuat di mata masyarakat. Kekosongan peran pemerintah dalam keamanan masyarakat langsung dikuasai oleh organisasi lokal salah satunya TTKKDH. Hal ini juga sejalan dengan organisasi TTKKDH yang memiliki kekuasaan di tempat

umum yaitu Pasar Rau Serang, dari wawancara yang dilakukan oleh Bapak Taufik sebagai anggota “iyaaaa ke Rau aja tanya tempat Haji Maman ga mungkin pada gatau orang yang punya kawasan Rau” dengan pemaparan tersebut menjelaskan bahwa TTKKDH memiliki akses publik yang seharusnya dikelola oleh pemerintah dalam pelaksanaannya para anggota TTKKDH mendapatkan akses seperti lahan parkir, keamanan pedagang atau salar, uang kebersihan. Selain hal tersebut Ketua DPP TTKKDH yaitu Wahyu Nurjamil saat ini merupakan seorang birokrat yang menjadi Kepala Dinas Diskopukmperindag Kota Serang yang aktif dalam mengelola UMKM di Kota Serang, dari dua jabatan yang dimiliki pasti terdapat kepemilikan seorang pemimpin yang digunakan untuk kepentingan baik secara nilai ataupun materiil. Dengan ini TTKKDH akan lebih terlegitimasi dan citra TTKKDH semakin baik oleh masyarakat karena sosok pemimpin yang aktif dalam permasalahan sosial dan masyarakat

Kedua, TTKDH dalam memperluas relasi pada politisi atau aktor kepentingan. Pada Pilgub 2017 TTKKDH ber-kooptasi dengan Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy untuk memenangkan paslon tersebut yang karena kedekatan TTKKDH dengan ketua Jawara Banten yaitu Chasan Sohib, dalam hal ini TTKKDH mendapatkan timbal balik dengan kesepakatan tidak tertulis, keuntungan yang didapatkan tidak terlepas dari adanya upaya pendekatan dengan pihak yang memiliki kekuasaan untuk kemudahan akses mewujudkan

kemaslahatan TTKKDH. Keberlangsungan aktivitas TTKKDH disokong oleh elite politik dengan kebutuhan seperti seragam, kesekretariatan atau tempat padepokan, kaos, ATK, keberlangsungan acara peresmian seperti pelantikan ketua umum. Keterbatasan sumber daya TTKKDH dapat dipenuhi ketika organisasi tersebut menjalankan kooptasi politik karena pada dasarnya organisasi ini hanya penggiat seni budaya yang kemampuannya sangat terbatas. Saat Pilgub 2017 Provinsi Banten organisasi TTKKDH mendapatkan pemberian berupa lima kendang dan seragam tentunya TTKDH juga mendapatkan dana hibah untuk pembinaan internal organisasi. Dalam memperluas relasi TTKKDH juga memiliki hubungan yang baik dengan aktor lokal lainnya seperti Abuya Muhtadi, kyai yang dihormati di daerah Banten. Kemudian TTKKDH pada saat ini menjadi lebih netral atau bersifat independen dengan berpihak pada semua partai politik, TTKKDH sedang berupaya menjaga hubungan baik dengan partai politik, dampaknya terdapat partai yang memberikan dana sebesar Rp, 20 JT dan 1 Ekor Kambing yang berasal dari PKS berdasarkan penuturan Bapak Hakim selaku Ketua Umum DPW Banten TTKKDH, hal tersebut digunakan sebagai strategi TTKDH untuk memperluas relasi dengan beberapa patron.

Ketiga, TTKKDH dalam mempertahankan eksistensi organisasi TTKKDH, organisasi dalam kepentingan ekonomi itu, mereka berusaha mempertahankan legitimasi kepemimpinan

mereka yang diperoleh dari budaya lokal. Adanya otoritas tradisionalnya itu menjadi semakin kuat karena mereka mampu menguasai lembaga-lembaga strategis di bidang ekonomi dan politik, seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah, Kadin Daerah dan lain sebagainya (ekonomi) dan wakil gubernur, walikota, lurah (politik), serta beberapa organisasi kepentingan lainnya. Dengan penguasaan tersebut perilaku politik jawara akhirnya mendapat legitimasi struktural. Selain itu TTKKDH juga berafiliasi dengan perusahaan yaitu PT Krakatau Steel karena faktor kedekatan dengan pemimpin organisasi DPW TTKKDH Banten.

RELASI PATRON KLIEN DALAM TTKKDH

Timbulnya hubungan relasi antara aktor di dalam politik tidak hanya melingkup kepada hal yang didasari oleh perasaan “kasihan” atau perasaan “hanya membantu” semua bentuk hubungan yang terjalin di ranah politik akan selalu dan pasti selalu menimbulkan keuntungan yang sangat menguntungkan dari kedua belah pihak bahkan lebih, mereka akan saling menopang dan saling melegitimasi kepentingan dari masing-masing aktor. Perjalanan dan proses yang terjadi di kancah strategi aktor dalam lingkup organisasi menjadikan organisasi TTKKDH ini berevolusi melalui proses sejarah dalam ruang dan waktu yang sangat panjang. Pengamatan penulis tentang hubungan relasi patron dan klien ini sejalan dengan tiga bentuk dari hasil dan kepentingan elite seta aktor lokal yang mewarnai sebuah

daerah, hasil ini diamati dengan hubungan yang terjalin oleh organisasi TTKKDH setelah penulis melakukan wawancara.



Gambar 2. Pola Patronase TTKKDH

Kerangka ini juga diperkuat dengan penjelasan dari Syarif Hidayat di dalam penelitian Bandiyah. Dalam jangkauan yang terjadi selama mempertahankan relasi kekuasaan yang dilakukan oleh organisasi TTKKDH selalu memakai bentuk take and give bentuk ini dilakukan untuk kepentingan ekonomi organisasi contohnya melalui wawancara bersama Bapak Hakim Sulaiman selaku ketua DPD TTKKDH Provinsi Banten mengungkap bahwa:

“Selama ini kita dapat pemasokan dari hubungan relasi yang terjadi, seperti misal pada ajang pemilihan presiden. Prabowo kasih ini, saya sebagai ketua DPD TTKKDH mengajak dan mengayom kepada anggota agar pilih dia. Ya dilihat saja dari hasil pemberian kami dan organisasi bisa terbeli baju seagam, baju kaos, bahkan matras untuk Latihan sehari-hari. Selain itu juga kita tidak mau terpusat juga hubungannya jadi diperluas dari hubungan ke partai politik seperti ke PKS, Golkar, PDIP, Demokrat dan semua partai demi menjaga independensi organisasi” (Wawancara Ir. Hakim Sulaeman Akbar Ketua DPD Kaseti TTKKDH Provinsi Banten, 24 Juli 2024)

Dari sini kita dapat melihat apa yang dimulai, apa yang disepakati, dan apa yang menjadi inti dari sebuah relasi hubungan adalah bentuk keuntungan. Selain contoh di atas hasil wawancara juga mengungkap kepada sumbangan partai politik untuk organisasi ini, contohnya pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ditahun ini pada hari raya Idul Adha menyumbang kambing khusus untuk organisasi TTKKDH, dimana pemberian dari partai ini selanjutnya akan disalurkan kembali kepada para anggota-anggota TTKKDH khususnya di lingkup TTKKDH DPD Provinsi Banten. Selain itu sumbangsih yang berikan dari aktor pemerintahan yang dilatar belakang partai dan aktor swasta pun ada, dari wawancara yang terlampir Bapak Hakim Sulaiman secara jelas mengungkap:

“Selanjutnya aliran dana dari Bapak H Yandri Susanto selaku Wakil Ketu Partai Amanat Nasional juga masuk. Pada saat saya dilantik beliau hadir dan mensponsori pelantikan ini. Selain itu ada dari Wakil Direktur KS (Krakatau Steel) yang merupakan sahabat saya juga ikut menyumbang dan memeriahkan” (Wawancara Ir. Hakim Sulaeman Akbar Ketua DPD Kaseti TTKKDH Provinsi Banten, 24 Juli 2024)

Pemasokan yang diberikan pada saat pelantikan tersebut sekitar Rp 200.000.000 yang digunakan untuk biaya atribut, persiapan acara, sewa hotel, interior, dan eksterior. Dimana di sini juga Bapak Hakim menyebutkan jika para anggota pasti akan

mendukung apa yang didukung oleh figur ketuanya, dari sini kita dapat mengetahui bahwa hubungan relasi yang diberikan oleh para aktor untuk kepentingan organisasi dan ketua tersebut mendukung maka akan ada dukungan tambahan yang lebih besar lagi dimana hal ini datangnya dari bentuk dukungan dari ketua mereka. Hubungan relasi ini dilakukan bukan tanpa sebab karena ini juga dilandasi dengan urgensi organisasi TTKKDH untuk memperoleh pendapatan biaya organisasi yang sumbernya dari luar, karena sumber keuangan organisasi dari dalam nilainya sangat sedikit bahkan hanya mengandalkan uang pribadi para ketua pimpinan, seperti yang di ucapkan oleh Bapak Hakim:

“Uang yang diperoleh ini ya selanjutnya di gunakan buat organisasi TTKKDH juga. Soalnya walaupun sudah diterapkan di dalam AD/ART tentang iuran buat anggota tetap sulit diminta ke mereka” (Wawancara Ir. Hakim Sulaeman Akbar Ketua DPD Kaseti TTKKDH Provinsi Banten, 24 Juli 2024)

Selanjutnya hubungan patron dan klien yang dilihat dari penulis adalah kepentingan mengembangkan karier anggota. Hal ini menjadi penting dibahas oleh penulis karena dari sinilah organisasi ini memulai kekuatannya untuk merambah dibidang politik pemerintahan. Karena organisasi ini bisa membentuk massa yang aktif dalam semarak mendukung calon-calon yang sedang berkompetisi. Seperti pencalonan H Wahyu Nurjamil pada

Pemilihan Walikota Serang ditahun 2024 hal ini pasti didukung penuh oleh para anggota TTKKDH. Dari sini kita dapat melihat bagaimana kehadiran mereka bisa digunakan sebagai senjata pemasok dukungan yang besar. Sejauh ini ada beberapa anggota dari organisasi TTKKDH yang berhasil menyeludup ke dalam lingkup pemerintahan dan politik seperti H Maman Rijal dari Partai Golkar, Pimpinan Daerah Legislator di Kabupaten Serang H Didit Suhendra, dan Bakal Calon Wali Kota H Wahyu Nurjamil di wilayah Kota Serang. Hadirnya latar belakang mereka di dalam organisasi TTKH menambah kekuatan mereka dibidang legitimasi dan massa pendukung. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Hakim

*“Kalo diliat secara realistis, kalo yang maju bagian dari kita ya pasti akan kita dukung. Secara memang kita melihat kesamaan dan kebersamaan, pasti seluruh anggota akan pilih mereka dan dukung mereka yang maju di dalam kontestasi khususnya para anggota TTKKDH contohnya Pak Wahyu nah itu tidak usah ditanya lagi pasti kita semua akan memilih dan mendukung beliau”
(Wawancara Ir. Hakim Sulaeman Akbar Ketua DPD Kaseti TTKKDH Provinsi Banten, 24 Juli 2024)*

Dari sini kita dapat melihat bagaimana pengembangan kepentingan karier yang terjadi terlebih jika para perwakilan dari anggota mereka terpilih pastinya akan ada perhatian khusus yang diberikan oleh calon

yang terpilih kepada organisasi dan para anggota TTKKDH. Selanjutnya kepentingan mengembangkan sponsor politik hal ini sedikit menyinggung kepada bentuk kepentingan ekonomi yang terjadi. Dimana hubungan patron dan klien akan terjalin dibungkus dengan kepentingan sponsor politik, seperti organisasi TTKKDH yang membangun hubungan untuk memperluas kepentingan seperti jaring, hal ini sebagai siasat organisasi agar mendapatkan banyak yang mendukung dan peduli. Dari bentuk sponsor politik juga kita dapat mengetahui berbagai bentuk strategi organisasi untuk mendapatkan sumbangsih dana melalui sponsor politik dari hubungan relasi yang tercipta dari berbagai partai politik, aktor formal, dan dari pihak swasta.

Dari ketiga pendekatan yang penulis simpulkan untuk mengungkap bentuk relasi hubungan patron dan klien organisasi TTKKDH ini kita mengetahui bagaimana gerak dan arah organisasi informal yang ternyata bisa seakrab ini untuk menjalin hubungan dan komunikasi dengan aktor-aktor formal. Mereka menyiasati bentuk patron dan klien untuk dapat saling menguntungkan secara tidak langsung, baik secara halus dan secara terang-terangan. Dari sini juga kita mengetahui bahwa kekuatan aktor informal tidak dapat kita sepelekan. Karena pada hakikatnya salah satu aspek terpenting agar birokrasi dan politik pemerintahan tampil profesional adalah dengan menjaga jarak dari kekuatan hubungan patron dan klien yang menguntungkan bagi mereka dan merugikan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis sebelumnya mengenai kooptasi politik yang tercipta dalam diri TTKKDH berkenaan dengan pengaruh untuk memperoleh dukungan atau kontrol dalam konteks politik, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi ini mungkin memiliki hubungan atau koneksi dengan pemimpin politik setempat, yang dapat mempengaruhi kebijakan atau dukungan untuk kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang dilakukan oleh TTKKDH. Sebaliknya, TTKKDH juga dapat memanfaatkan dukungan politik untuk memperkuat posisi dan keberadaannya dalam masyarakat dan pemerintahan setempat. Namun demikian, sementara kooptasi politik dapat memberikan manfaat seperti dukungan finansial atau keamanan keberlangsungan organisasi, hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan kekuasaan. Adanya kedekatan antara TTKKDH dengan elite politik memperlihatkan dinamika yang kompleks dan perlu dikelola dengan bijaksana agar organisasi tetap dapat menjalankan misinya secara efektif tanpa mengorbankan nilai-nilai kebudayaan dan integritasnya. Dilain sisi, prinsip solidaritas dan kesetiaan dalam organisasi TTKKDH dapat memudahkan pola kooptasi politik, di mana pengaruh politik dari elite politik dapat dimanfaatkan untuk mendukung agenda atau kegiatan TTKKDH, seperti penggalangan dana atau promosi kebijakan budaya, namun kehadiran

anggota TTKKDH di dalam struktur elit politik juga dapat memberikan keuntungan dalam bentuk dukungan atau legitimasi politik untuk organisasi mereka. Dalam upaya mempertahankan, mengakses, dan memperluas relasi dengan aktor-aktor politik seperti pemerintah, pemangku kepentingan, beberapa partai politik, dan perusahaan swasta, TTKKDH menerapkan strategi netralitas yang cukup cerdas.

Saat ini, organisasi TTKKDH dapat disebut berhasil dalam membangun kedekatan dengan berbagai partai politik tanpa terjebak dalam afiliasi yang eksklusif. Kooptasi politik yang dijalankan TTKKDH menjadikan dimanfaatkan sebagai pengaruh dan instrumen mobilitas massa internalnya untuk mendukung kemenangan kontestasi politik tertentu. Dalam hal ini, TTKKDH mungkin memobilisasi anggotanya untuk memberikan legitimasi dan dukungan dalam kampanye atau pemilihan politik. Fenomena ini dapat dikatakan sangat mengindikasikan adanya pola patron-klien di mana TTKKDH bertindak sebagai patron yang memberikan dukungan politik kepada klien atau calon politik tertentu dalam pertukaran untuk dukungan atau manfaat lainnya, seperti akses ke sumber daya atau pengakuan publik. Kita dapat melihat bagaimana hubungan patron dan klien dalam organisasi TTKKDH dapat bergerak dan berinteraksi dengan aktor-aktor formal. Meskipun organisasi ini bersifat informal, mereka mampu menjalin hubungan dan komunikasi yang erat dengan pihak-pihak formal. Mereka mengelola hubungan patron dan klien secara cerdas untuk saling

menguntungkan, baik dengan cara yang halus maupun terang-terangan. Penting untuk diakui bahwa kekuatan aktor informal, seperti yang dimiliki oleh TTKKDH, memiliki dampak yang signifikan dan tidak boleh diabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2014). *Mengapa Negara Gagal, Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Al Salam, F., Anwar, C., & Khairunnisa, H. (2024). The Essence of Internal Control at XYZ Automotive Limited in a Phenomenological Perspective. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 5(1), 980-993.
- Arriola, L. R., Devaro, J., & Meng, A. (2021). Democratic subversion: Elite cooptation and opposition fragmentation. *American Political Science Review*, 115(4), 1358-1372.
- Aspinall, E., & As'ad, M. U. (2016). Understanding family politics: Successes and failures of political dynasties in regional Indonesia. *South East Asia Research*, 24(3), 420-435.
- Astuti, D. S. (2023). *POLITIK 'JAWARA'BANTEN PASCA CHASAN SOCHIB: TOKOH INFORMAL DI ARAS LOKAL* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA).
- Facal, G. (2019). *The Persistence of Civil Militias in Banten and Lampung, Indonesia*". Kawaluu.
- Holdo, M. (2019). Cooptation and non-cooptation: Elite strategies in response to social protest. *Social Movement Studies*, 18(4), 444-462.
- Ikhwan, G. I. (2024). *PERAN PERGURUAN SILAT KESTI TTKKDH DALAM PENANAMAN NILAI MORAL DAN KEAGAMAAN PADA REMAJA DI KECAMATAN KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Ikhwan, G. I. (2024). *PERAN PERGURUAN SILAT KESTI TTKKDH DALAM PENANAMAN NILAI MORAL DAN KEAGAMAAN PADA REMAJA DI KECAMATAN KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Irfani, F., Nafiudin, I., & Jamaluddin, W. (2019). Political Jawara of Local Moslem Elits Among Banten Oligarchy In Indonesia After The New Order Era. *JAWI*, 1(1).
- Mahardika, R. (2021). Warok Pendekar Penghenti Money Politics: Peran Jejaring Warok dalam Kontestasi Politik di Tingkat Lokal (Studi Kasus Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Ponorogo). *Jurnal PolGov Vol*, 3(2).
- Mahpudin, M. (2019). Demokrasi dan Kebangkitan Politik Identitas: Refleksi Perjalanan Demokrasi

- Indonesia Pasca Orde Baru. *ijd-demos*, 1(1).
- Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 47-68.
- McAdam, D. (2010). Political process and the development of black insurgency, 1930-1970. University of Chicago Press.
- Najam, A. (2000). The four C's of government third Sector-Government relations. *Nonprofit management and leadership*, 10(4), 375-396.
- Pribadi, Y. (2014). *Strongmen Dan Kelompok Kekerasan Di Jawa Perkembangan dan Realisasinya dengan Kekerasan Masa dalam Bingkai Budaya dan Politik di Indonesia*. FTK Banten Press & LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Putri, R. T. S. I., & Herawati, N. R. (2023). Relasi Patron Klien Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama dalam Kemenangan Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 210-229.
- QURASIN, N. (2017). PERKEMBANGAN ALIRAN PERSILATAN TJIMANDE TARI KOLOT KEBON DJERUK HILIR (TTKKDH) DI BANTEN (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" BANTEN)
- Radar Banten. (2024, April 25). Demi Maju di Pilkada Kota Serang, Wahyu Nurjamil Siap Mundur dari ASN. Diakses pada 25 April 2024 dari <https://www.radarbanten.co.id/2024/04/25/demi-maju-di-pilkada-kota-serang-wahyu-nurjamil-siap-mundur-dari-asn/>
- Reuter, O. J., & Robertson, G. B. (2015). Legislatures, cooptation, and social protest in contemporary authoritarian regimes. *The journal of politics*, 77(1), 235-248.
- Saepudin, D., & Kamaruddin, D. (2018). Jawara and Local Election (Case Study of The Jawara Role of Tjimande Tari kolot Kebon Djeruk Hilir to win Wahidin Halim-Andika Hazrumy in the 2017 Banten gubernatorial election). In *Proceedings of the 2nd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2017)*. <https://doi.org/10.2991/icosop-17.2018> (Vol. 19).
- Sugiyono. (2017). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Bandung: ALFABETA.